

'Batasi swasta di telekomunikasi'

Oleh AFRIYANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Kepemilikan saham swasta, baik asing maupun entitas bisnis lainnya, di industri telekomunikasi harus dibatasi jumlahnya.

"Pembatasan kepemilikan saham ini penting, karena telekomunikasi masih menjadi industri yang strategis bagi negara dan termasuk dalam salah satu sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak," ujar Direktur Intercafe Iman Sugema dalam sebuah diskusi, kemarin.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah harus secepatnya membuat regulasi tentang kepemilikan saham dalam industri telekomunikasi tersebut.

Menurut dia, jumlah kepemilikan saham swasta di industri telekomunikasi dapat saja diatur, seperti kepemilikan maksimum swasta yang diijinkan pemerintah, atau bisa juga mengadopsi sistem kepemilikan saham di industri perbankan (*single presence policy/SPP*) atau kebijakan kepemilikan tunggal. Apalagi saat ini banyak perusahaan yang menguasai lebih dari dua per-

usahaan telekomunikasi.

Iman menambahkan dalam industri telekomunikasi, sebaiknya investor (asing maupun domestik) hanya memiliki saham di satu perusahaan telekomunikasi. "Jika dibiarkan tidak ada aturannya, maka siapa yang punya uang akan memonopoli industri ini dan ini jadi tidak sehat, terlebih industri ini sangat strategis."

Iman menambahkan dalam regulasi telekomunikasi tersebut setiap kepemilikan entitas bisnis baik asing maupun domestik harus dibatasi maksimal 20%. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar tidak ada pengendali tunggal dalam industri telekomunikasi.

"Jika tidak ada pengendali tunggal, semuanya akan fokus pada pemberian pelayanan yang terbaik untuk konsumen, bukan untuk kepentingan pemegang saham semata."

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrison Baswir mengatakan maraknya kepemilikan saham swasta di industri telekomunikasi lebih disebabkan oleh tidak jelasnya regulasi pemerintah.